

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
(TAHUN 2010-2015)**

Kusumawati Astuti Susilo

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

kusumawatastuti6@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan dan pembangunan seharusnya dapat berjalan beriringan tanpa perlu mengunggulkan salah satunya. Dengan mengutamakan tujuan pembangunan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka aspek tujuan pemerataan akan tersingkir. Sehingga ketimpangan pendapatan akan terjadi antara wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect*). Data yang digunakan adalah data sekunder 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel indeks pembangunan manusia, upah minimum regional, belanja modal, inflasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah periode 2010- 2015.

Kata Kunci : *Pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, upah minimum regional, belanja modal, inflas*

PENDAHULUAN

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatannya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan sampai sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan terhadap masyarakat pada periode tertentu. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara memang sangat penting khususnya di Negara-negara berkembang salah satunya adalah Indonesia.

Tujuan awal pembangunan pada tahap awal pada dasarnya lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka aspek prioritas dengan kriteria efisiensi yang tinggi menyebabkan sektor-sektor ekonomi tumbuh tidak merata (Hasibuan,1993). Dengan mengutamakan tujuan pembangunan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka aspek tujuan pemerataan akan tersingkir. Sebaliknya, jika tujuan pembangunan yang utama adalah pemerataan (misalnya dalam hal pembagian pendapatan), maka tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat tercapai (Hasibuan,1993).

Ketimpangan antar daerah merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh negara berkembang khususnya Indonesia. Ketimpangan dapat berupa ketimpangan pendidikan, ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendapatan, ketimpangan kesehatan, dan ketimpangan industri (Agusta,2014). Pada negara berkembang ketimpangan pendapatan menjadi fokus penting, Professor Kuznet mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, kondisi distribusi pendapatan cenderung memburuk atau mengalami kondisi dimana ketimpangan pendapatan sangat tinggi. Akan tetapi, pada tahap berikutnya akan semakin membaik. Hipotesis tersebut dikenal dengan hipotesis “U-terbalik”.

Kesenjangan terjadi dapat bermula dari perbedaan pembangunan antar wilayah, seperti halnya perbedaan infrastruktur dari mulai kondisi jalan, kesehatan, pemukiman, perumahan dan lain-lain. Ketimpangan yang semakin besar menyebabkan berbagai masalah diantaranya adalah meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya imigrasi yang nantinya akan berpengaruh pada ketidakstabilan dalam perekonomian.

Masalah ketimpangan juga terjadi pada provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Pulau Jawa. Ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari tabel gini rasio. Kesenjangan yang cukup tinggi di Jawa Tengah menyebabkan 15 Kabupaten dari 35 kabupaten/kota masih merupakan daerah yang tertinggal. Dilihat dari pendapatan perkapita masing-masing daerah terdapat 5 kabupaten yang tergolong miskin yaitu Kebumen, Grobogan, Wonosobo, Blora, dan Tegal.

Perbedaan tingkat upah yang diterima masyarakat juga dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan yang terjadi di provinsi Jawa Tengah. Adanya perbedaan pendapatan yang diterima masing-masing masyarakat akan berpengaruh pada pemenuhan hidup setiap masyarakat. Pekerja-pekerja muda yang tingkat pendidikan dan keterampilannya relatif rendah akan memperoleh upah yang rendah pula, hal tersebut menyebabkan perbedaan pembagian pendapatan semakin panjang (Hasibuan,1993). Semakin tinggi upah atau uang yang akan diterima masyarakat akan menimbulkan masalah baru yang akan menimbulkan ketimpangan pendapatan semakin memburuk salah satunya adalah inflasi.

Upah tinggi yang diterima oleh sebagian masyarakat akan memberikan perbedaan jumlah konsumsi, karena bagi sebagian orang yang memiliki pendapatan tinggi pasti akan menambah jumlah konsumsinya, semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula jumlah pengeluarannya. Semakin tingginya jumlah pengeluaran tanpa ada pengendalian akan memberikan dampak pada tingkat inflasi didaerah tersebut. Tingginya jumlah uang beredar dimasyarakat dapat juga disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran pemerintah yang dilakukan untuk membangun proyek-proyek tertentu atau untuk gaji pegawai.

Masalah lain yang dapat menyebabkan ketimpangan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). IPM yang tidak merata akan menyebabkan perbedaan pembangunan, karena daerah yang IPM yang tinggi akan lebih maju dalam pembangunan, sehingga dapat mengatasi masalah ketimpangan pendapatan yang terjadi di daerah Jawa Tengah. IPM yang rendah akan

mempengaruhi keinginan bekerja bagi seseorang. IPM menunjukkan seberapa baik kualitas manusia di wilayah tersebut yang dilihat dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, rata-rata lama sekolah, dan ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, upah minimum regional, belanja modal, dan inflasi dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

KAJIAN PUSTAKA

Abdulah (2013) meneliti menggunakan data sekunder dengan panel metode Data *regression* selama 10 tahun, terdapat 35 data *cross section* yang mewakili setiap kabupaten. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan variabel urbanisasi, upah minimum, dependensi rasio, *share output* perekonomian pemilik modal sebagai variabel independen dan ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen.

Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa dua variabel yang signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Tengah yaitu variabel upah minimum dan *share output* perekonomian pemilik modal. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu urbanisasi dan dependensi rasio tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah.

Rosyadi (2014) melakukan penelitian menggunakan data panel dengan objek penelitian 10 Provinsi di pulau Sumatera dari tahun 2008-2010. Variabel yang digunakan adalah inflasi, upah minimum provinsi, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dan ketimpangan distribusi pendapatan sebagai variabel dependennya yang diukur menggunakan indeks gini

Hasil dari penelitian Rosyadi adalah variabel inflasi dan UMP mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan, variabel tingkat pengangguran

mempunyai pengaruh negatif, dan pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Diah Pradnya Dewi dan Ida Bagus Putu (2017) meneliti dengan menggunakan data sekunder periode 2008-2015, observasi non partisipan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dan analisis jalur sebagai teknik analisisnya.

Hasil dari penelitian tersebut terdapat pengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan IPM dan investasi tidak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening yang mempengaruhi IPM dan biaya infrastruktur secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Shanty dan Suardhika (2014) melakukan penelitian dengan data yang digunakan adalah data sekunder menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012 dengan menggunakan data panel, teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU dan Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan untuk belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

Lestari (2016) melakukan penelitian menggunakan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Jumlah Penduduk sebagai variabel independennya. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode *explanatory*, yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terkait dengan menggunakan data sekunder.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

LANDASAN TEORI

A. Ketimpangan Pendapatan

Teori disparitas pendapatan wilayah dikemukakan oleh Jeffery G. Williamson (Adisasmita, 2013). Dalam suatu wilayah yang memiliki pendapatan perkapita tinggi pasti diikuti dengan perbedaan pendapatan perkapita yang di terima pada masing-masing masyarakat. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan: (a) *tinggi*, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan; (b) *sedang*, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 17% bagian pendapatan; (c) *rendah*, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan (Kuncoro, 1997).

Ketimpangan pendapatan tidak lepas dari angka rasio gini. Koefisien gini merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh (BPS, 2016). Gini rasio diukur mulai angka 0 hingga 1, semakin tinggi nilai indeks gini pada suatu daerah maka menunjukkan bahwa ketidakmerataan pendapatan pada daerah tersebut semakin tinggi. Indeks gini yang menunjukkan angka nol menunjukkan bahwa daerah tersebut terdapat pemerataan pendapatan yang sempurna, atau tidak ada ketimpangan pendapatan.

Indeks Theil dan indeks L sangat banyak digunakan untuk mengukur ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah. Kedua indeks tersebut masuk dalam family ukuran ketimpangan "*generalized entropy*" (BPS, 2016). Nilai yang digunakan GE sangat bervariasi yaitu antara 0 dan ∞ , dimana 0 berarti distribusi merata dan nilai yang lebih tinggi berarti tingkat ketimpangan dalam kondisi yang buruk. Parameter α mewakili penimbang yang diberikan jarak antara pendapatan yang berbeda dari distribusi pendapatan.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Ricardo dan Malthus berpendapat bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai *Stationary State* dimana perkembangan ekonomi tidak akan terjadi lagi. Dalam analisis Neo Klasik laju pertumbuhan ekonomi tidak bergantung pada permintaan masyarakat akan tetapi tergantung pada pertumbuhan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan dapat menunjukkan suatu hubungan yang negatif maupun positif. Tahap pertama pembangunan ekonomi ekonomi akan mengalami tingkat perbedaan pembagian pendapatan yang semakin memburuk, kemudian stabil, dan pada akhirnya akan semakin membaik. Hal ini disebabkan oleh terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok menengah atas, kurang efektifnya pajak progresif, dan terjadinya akumulasi pemilikan modal (Hasibuan,1993).

Para ekonom berpendapat bahwa naiknya pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan yang terjadi pada daerah tersebut. Dengan naiknya pertumbuhan ekonomi menandakan bahwa perekonomian daerah tersebut cukup baik sehingga masalah ketimpangan pendapatan dapat menurun seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi berikutnya.

C. Upah Minimum Regional

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya (Sumarsono,2003).

Penetapan UMR dilakukan dengan melihat beberapa variabel diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pekerja (Feriyanto, 2014). Perbedaan penerimaan pendapatan

yang diterima masing-masing kelompok memang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Peningkatan upah minimum hanya dapat dinikmati para buruh yang mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga buruh yang mempunyai kualitas lebih tinggi akan mendapatkan upah yang lebih tinggi, hal tersebut menyebabkan pendistribusian pendapatan menjadi tidak merata.

D. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan akumulasi dari pengukuran perbandingan antara angka melek huruf, harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup dalam suatu Negara. IPM dapat mengukur bagaimana kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Indeks pembangunan manusia dapat diukur melalui tiga indikator yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar hidup. IPM yang berbeda pada tiap-tiap daerah menandakan produktivitas yang dimiliki masyarakat masing-masing daerah juga berbeda. Perbedaan ini akan berpengaruh pada pendapatan yang akan diterima masyarakat nantinya akan berbeda.

Brata (2002) menyatakan bahwa peningkatan IPM pada suatu daerah yang tidak diikuti dengan peningkatan IPM pada daerah lainnya akan memicu terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan. Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa perbedaan IPM mempengaruhi ketimpangan pendapatan pada daerah tersebut.

E. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pengadaan atau pembangunan asset tetap yang terwujud yang memberi manfaat lebih dari satu tahun, dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dari pemerintah. Menurut Adolf Wagner dalam Badrudin (2012), produksi barang dan jasa dalam masyarakat dibedakan antara barang dan jasa kolektif dan barang dan jasa swasta.

Menurut Peacock-Wiseman pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin besarnya kegiatan pemerintah yang

memerlukan pembiayaan. Peacock-Wisman juga berpendapat bahwa pengeluaran negara tidak bersifat pertumbuhan yang berkelanjutan. Pengeluaran pemerintah melalui belanja modal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan dan investasi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Membaiknya pembangunan seperti halnya infrastruktur akan menarik para investor untuk berinvestasi, investasi yang semakin meningkat akan memberi banyak keuntungan bagi suatu wilayah seperti halnya dengan meningkatnya investasi maka akan memberi banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang nantinya akan berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran, dan distribusi pendapatan akan semakin merata

F. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara umum. Kenaikan harga yang terjadi bukan berarti setiap harga naik dengan presentase yang sama, jika kenaikan harga disuatu daerah terjadi hanya sementara dan tidak secara terus menerus tidak dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mengalami inflasi. Teori Kuantitas menjelaskan bahwa inflasi terjadi ketika kenaikan jumlah uang beredar, harga yang tinggi disebabkan karena tingginya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kenaikan inflasi memberi dampak pada kuantitas daya beli masyarakat, sebagian masyarakat memilih menurunkan jumlah konsumsinya ketika inflasi meningkat. Inflasi dalam suatu perekonomian negara sering menjadi “simalakama”, karena inflasi dapat memberikan dampak positif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak negatif (Prasetyo, 2009).

Tingkat inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan dimana inflasi mempengaruhi kinerja perusahaan disektor riil melalui penurunan laba akibat dari mahalnya biaya produksi serta penurunan daya beli masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam data sekunder, data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan bukan yang dihasilkan oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan gabungan data *Cross Section* dari

35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan *Time Series* dari tahun 2010-2015. Data tersebut dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian sebelumnya maupun dari publikasi BPS Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun dan dalam beberapa judul publikasi seperti, Jawa Tengah dalam Angka, Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk, dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengujian Data Panel

1. Hasil Uji F-Statistik

Uji ini digunakan untuk memilih model mana yang akan digunakan antara model estimasi *Common Effect* atau model *Fixed Effect*. Apabila probabilitas F-statistik tidak signifikan atau $\alpha > 5\%$, maka model yang dipilih adalah model estimasi *Common Effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F-statistik signifikan atau $\alpha < 5\%$, maka model yang dipilih adalah model estimasi *Fixed Effect*.

Hasil Uji Signifikansi *Fixed Effect*

Effect Test	Statistik	d.f	Prob.
Cross-Section F	4.563591	(34,169)	0.0000
Cross Section Chi Square	136.131107	34	0.0000

Dari hasil uji signifikansi *fixed effect* diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau $\alpha < 5\%$, artinya menolak H_0 dan memilih H_1 . Hal tersebut menunjukkan bahwa model estimasi yang dipilih adalah model *Fixed Effect*.

2. Hasil Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model mana yang akan digunakan antara model estimasi *Fixed Effect* atau model *Random Effect*. Apabila probabilitas *Chi Square Statistic* tidak signifikan atau $\alpha > 5\%$, maka model yang dipilih adalah model estimasi *Random Effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *Chi Square Statistic* signifikan atau $\alpha < 5\%$, maka model yang dipilih adalah model estimasi *Fixed Effect*.

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross section random	33.013885	5	0.0000

Dari hasil uji Hausman diperoleh nilai sebesar 33,013885 dengan probabilitas sebesar 0,0000 atau $\alpha < 5\%$, artinya menolak H_0 dan memilih H_1 . Hal tersebut menunjukkan bahwa model estimasi yang dipilih adalah menggunakan model *Fixed Effect*.

B. Hasil Pengujian Statistik

Berdasarkan hasil uji spesifikasi model dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman dihasilkan bahwa keduanya memilih model *fixed effect*, model yang tepat untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah adalah model *Fixed Effect*.

Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Variabel Independen Kemiskinan	Koefisien	Std. Error	Prob.
C	0.002087	0.163580	0.9898
PE	0.001247	0.003025	0.6806
IPM	0.029199	0.005114	0.0000
LOG_UMR	-0.154035	0.031151	0.0000
LOG_BM	0.023487	0.005422	0.0000
IF	-0.002371	0.000807	0.0038
R ²	0.648552		
F-Statistik	7.996602		
Probabilitas	0.000000		
Durbin-Watson Stat.	2.087164		

C. Pengujian Statistik

1. Koefisien Determinasi (R²)

Dari hasil regresi model *Fixed Effect* diperoleh nilai R² sebesar 0,648552, artinya bahwa variabel dependen KP dapat dijelaskan oleh variabel independen

PE, IPM, UMR, BM dan IF sebesar 64,8% dan sisanya sebesar 35,2% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel yang telah digunakan diluar model.

2. Pengujian Signifikansi Simultan (uji F)

F-hitung pada regresi *fixed effect* (Tabel 4.3) menunjukkan nilai sebesar 7,996602, dengan probabilitas sebesar 0,0000 ($< \alpha = 5\%$). Artinya bahwa variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), Belanja Modal (BM), dan Inflasi (IF) secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen yaitu Ketimpangan Pendapatan (KP).

D. INTERPRETASI HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil estimasi *fixed effect*, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dan signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Dalam Todaro & Smith (2011) menjelaskan masalah yang terjadi bukan hanya soal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi siapa saja yang akan berkontribusi untuk menumbuhkannya, apakah sebagian kecil orang atau banyak orang. Dalam penelitian Rosyadi menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah saat pertumbuhan ekonomi meningkat namun pemerataan pembangunan tidak dirasakan oleh seluruh kalangan.

2. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dilihat dari hasil estimasi model *fixed effect*, indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Dilihat dari koefisien indeks pembangunan manusia sebesar 0,029199, artinya bahwa apabila indeks pembangunan manusia naik 1% maka ketimpangan pendapatan naik sebesar 0,029199%. Hal tersebut tidak sesuai

dengan hipotesis bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kerimpangan pendapatan.

Penelitian Brata (2002) mengatakan bahwa peningkatan IPM pada suatu daerah tetapi tidak diikuti dengan peningkatan IPM pada daerah lainnya akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan. Peningkatan kualitas penduduk jika peningkatan tersebut tidak merata maka akan menyebabkan ketimpangan pendapatan makin memburuk.

3. Analisis Pengaruh Upah Minimu Regional terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil estimasi model *fixed effect*, menunjukan hubungan antara upah minimum regional dengan ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif signifikan dengan koefisien sebesar $-0,154035$, artinya ketika upah minimum regional naik sebesar 1% maka ketimpangan pendapatan akan turun sebesar $0,154035\%$. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa upah minimum regional berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Musfidar (2012) yang mengatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Kenaikan upah minimum juga dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan pada suatu wilayah meningkat, apabila kenaikan tersebut terjadi secara drastis hanya pada wilayah tertentu sedangkan untuk beberapa wilayah tidak menaikkan upah minimum regionalnya.

4. Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hubungan belanja modal dengan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan. Dilihat dari koefisien belanja modal sebesar $0,023487$, artinya bahwa ketika belanja modal naik sebesar 1% maka ketimpangan pendapatan naik sebesar $0,023487\%$. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Permasalahan utamanya adalah ketika belanja modal dikeluarkan secara tidak merata untuk masing masing wilayah maka hal yang akan terjadi adalah

ketimpangan akan semakin memburuk, selain itu belanja modal tidak hanya dikeluarkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Hal tersebut yang menyebabkan belanja modal di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

5. Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dilihat dari hasil estimasi *fixed effect*, menunjukan hubungan antara inflasi dengan ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif signifikan dengan koefisien sebesar -0,002371, artinya bahwa ketika inflasi naik 1% maka ketimpangan pendapatan turun sebesar 0,002371%. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan inflasi terkadang tidak memberi dampak terhadap daerah yang inflasinya masih tergolong rendah seperti halnya Provinsi Jawa Tengah, peningkatan inflasi justru dapat memicu masyarakat untuk semakin membuka usaha yang nantinya menyebabkan meningkatnya lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya lapangan pekerjaan maka pengangguran disuatu daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah akan berkurang, sehingga ketimpangan pendapatan akan semakin menurun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel indeks pembangunan manusia, upah minimum regional, belanja modal, inflasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010- 2015.

Variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, upah minimum regional, belanja modal dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, R.. (2013), “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah”. ISSN 1979-715X, 2013, 42-53.
- Adisasmita, Rahardjo (2013), Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Agusta, Ivanovich (2014), Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis, dan Pradigmatis Sejak Pra Kolonial. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2016), Pemertaan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2016. Badan Pusat Statistik. Jawa Tengah.
- Badrudin, Rudy (2012), Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Brata, Aloysius Gunadi (2002), Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia. JEP Vol 7, No. 2
- Dewi, Diah Pradnya, Ida Bagus Putu (2017), Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. E-Jurnal Vol. 6, No.2. Februari 2017
- Ferryanto, Nur (2014), Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hasibuan, Nurimansjah (1993), Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi. Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Kuncoro, Mudrajad (1997), Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Musfidar, Ma'mun (2012), “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010”, Skripsi

Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Hasanuddin. Makasar.

Prasetyo, P. Eko (2009). “Fundamental Makro Ekonomi”. Beta Offset, Yogyakarta

Rosyadi, M. Irfan (2014). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar Provinsi di Pulau Sumatera” Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Sumarsono, Sonny (2003), Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakeraan, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C, (2011), Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan. Jakarta, Penerbit Erlangga.

